



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



# Persiapan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknologi Informasi Tahun 2019



REFORMASI  
HUKUM



## TIGA BESAR TEMA RAKOR TI 2019 TERPILIH

1. TIK Unggul, Kumham PASTI Maju. => USULAN SC
2. Transformasi TI berbasis digital.
3. Akselerasi e-Gov Kemenkumham PASTI.

## Backdrop RAKOR TI 2019



  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA

# RAPAT KOORDINASI TEKNOLOGI INFORMASI

Tema :  
“Akselerasi Teknologi Informasi Menuju Kemenkumham PASTI”

Mirah Hotel - Bogor, 25 s/d 27 September 2019

     

# Rapat Koordinasi Teknologi Informasi Kemenkumham

## Hari 1 / Rabu, 25 September 2019

Waktu	Acara	Penanggung Jawab	Ket
12.00 – 13.00	Check In Hotel Mirah – Bogor	Rehan	
19.00 – 20.00	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Pengayoman 2. Laporan Kapusdatin 3. Penandatanganan MoU : a. KAPUSDATIN dengan BSSN tentang Digital Signature b. Kapusdatin dengan Sekda NTT tentang Pemanfaatan SISUMAKER di Pemprov NTT c. Kapusdatin dengan Wakil Bupati Malang tentang Pemanfaatan SISUMAKER di Pemkot Malang 4. Sambutan dan Arahan Sekretaris Jenderal sekaligus membuka Rakor TI 5. Pembacaan Do'a 6. Foto Bersama	1. Agung Aribawa 2. Santi 3. Bayu Protokol Bidjar  Bid SKTI  Bidjar  Bidjar + SKTI	Ball Room           
20.00 – 21.00	Pemaparan materi MENPAN. Narasumber Dr. Eng. Imam Machdi, M.T (Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem). Topik bahasan: penjelasan Perpres SPBE terkait pemenuhan indikator penilaian SPBE.	Bidjar + SKTI	Ball Room
21.00 – 21.30	Pengarahan Mekanisme Rakor TI	Ketua Panitia	Ball Room

## Hari 2 / Kamis, 26 September 2019

Waktu	Acara	Penanggung Jawab	Ket
08.00 – 10.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Biro Perencanaan</li> <li>2. Kepala Biro Kepegawaian</li> <li>3. Kepala Biro Keuangan</li> <li>4. Kepala Biro Umum</li> <li>5. Kepala Biro Pengelolaan BMN</li> <li>6. Kepala Biro Humas dan KLN</li> </ol>	Moderator : Kepala Subdirektorat Perencanaan Dan Pengembangan Direktorat Sistem Dan Teknologi	Ball Room
10.00 – 12.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Sistik Ditjen Imigrasi</li> <li>2. Direktur TI Ditjen AHU</li> <li>3. Direktur TI Ditjen KI</li> <li>4. Direktur TI dan Kerjasama Ditjen PAS</li> <li>5. Inspektur Wilayah IV</li> </ol>	Moderator : Kasubdit Pengembangan TI Ditjen Pemasarakatan	Ball Room
12.00 – 13.00	ISHOMA		
13.00 – 15.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Pengundangan &amp; Publikasi Ditjen PP</li> <li>2. Kapusdok BPHN</li> <li>3. Kapuspenkom BPSDM Hukum dan HAM</li> <li>4. Direktur Informasi HAM Ditjen HAM</li> <li>5. Kapusbang DATIN Balitbang Kumham</li> </ol>	Moderator : Kasubdit Pengembangan TI Ditjen AHU	Ball Room
15.00 – 15.30	ISHOMA		

## Lanjutan ..... Hari 2 / Kamis, 26 September 2019

Waktu	Acara	Penanggung Jawab	Ket
15.30 – 17.30	KOMISI I SDM, KEBIJAKAN, PERENCANAAN DAN ANGGARAN TI	Narasumber : Kepala Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan  Moderator : Kepala Subbidang Perencanaan Dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pusat Data Dan Teknologi Informasi	Ruang A Petugas Pusdatin : 1. Nova Dahliyanti 2. Zulfikar 3. Pramita 4. Tian
	KOMISI II INFRASTRUKTUR, LAYANAN , PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN TI	Narasumber : Kasubdit Perencanaan dan Dukungan Teknis Ditjen AHU  Moderator : Kepala Subbidang Pengamanan Data Dan Jaringan Pusat Data Dan Teknologi Informasi	Ruang B Petugas Pusdatin : 1. Edhi Hendrico 2. Aida 3. Satrio 4. Emir
	KOMISI III DATA, INFORMASI DAN KERJASAMA TI	Narasumber : Kasubdit Pengelolaan Data dan Pelaporan Ditjen IM  Moderator : Kepala Subbidang Pemeliharaan Teknologi Informasi Pusat Data Dan Teknologi Informasi	Ruang C Petugas Pusdatin : 1. Raharyo Handono 2. Bangun W 3. Amir 4. Robby
17.30 – 18.30	ISHOMA		
18.30 – 20.30	Perumusan	Masing-masing Komisi	Ruang A, B, C
20.30 – 21.00	Rapat Pleno Hasil Perumusan oleh Tim Perumus		Ball Room / Ruang X

## Hari 3 / Jumat, 27 September 2019

Waktu	Acara	Pelaksana	Ket
08.00 – 09.00	Penyampaian Hasil Rumusan	Tim Perumus Kepada Kepala Bagian Pemantauan Analisis dan Pelaporan, Biro Perencanaan	Ruang X
09.00 – 10.00	Penandatanganan Kesepakatan Hasil Action Plan yang akan menjadi Rujukan/bahan pada Rapat Kerja Eselon I dan II Kemenkumham	Seluruh Wakil Unit Eselon I (Tim Perumus) menandatangani Action Plan	
10.00 – 10.30	<b>Penutupan</b>	1. Agung Aribawa 2. Santi 3. Bayu	Ruang X
10.30 – 13.00	Makan Siang dan Check Out		

# Pointer

SDM, KEBIJAKAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TI

## 1. Kepala Biro Perencanaan

Peranan Renstra Kemenkumham dalam mendukung *E-Government*

## 2. Kepala Biro Kepegawaian

Pemanfaatan TI dalam mengubah pola pikir dan budaya kerja pegawai Kementerian

## 3. Kepala Biro Keuangan

Pengelolaan Keuangan Berbasis TI dalam menghasilkan akuntabilitas dan transparansi keuangan

## 4. Kepala Biro Umum

Pemanfaatan TI dalam mendukung aktivitas administrasi persuratan dan layanan kesehatan

## 5. Kepala Biro Pengelolaan BMN

Pemanfaatan TI dalam mendukung pengelolaan dan pelaporan BMN

## 6. Kepala Biro Humas dan KLN

Peran Teknologi Informasi dalam menyebarluaskan informasi yang *up-to-date*



# Pointer

## INFRASTRUKTUR, LAYANAN, PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN TI

### 1. Direktur Sistik Ditjen Imigrasi

Pemanfaatan SIMKIM dalam meningkatkan layanan keimigrasian yang transparan, akuntabel dan responsif

### 2. Direktur TI Ditjen AHU

Strategi Ditjen AHU dalam meningkatkan layanan publik melalui AHU Online.

### 3. Direktur TI Ditjen KI

Inovasi TI dalam pelayanan kekayaan intelektual berstandar internasional

### 4. Direktur TI dan Kerjasama Ditjen PAS

Penguatan Sistem Pengawasan terhadap petugas dan warga binaan melalui dukungan infrastruktur TI.

### 5. Inspektur Wilayah IV

Kesiapan Inspektorat Jenderal dalam melakukan audit TI di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

# Pointer

DATA, INFORMASI DAN KERJASAMA TI

## 1. Direktorat Pengundangan & Publikasi Ditjen PP

Inovasi TI dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## 2. Kapusdok BPHN

Integrasi data peraturan perundang-undangan dan D

## 3. Kapuspenkom BPSDM Hukum dan HAM

Implementasi TI guna peningkatan kompetensi ASN dan pembuatan kurikulum diklat untuk SDM TI

## 4. Direktur Informasi HAM Ditjen HAM

Pemanfaatan TI dalam mendukung penegakan HAM di masyarakat.

## 5. Kapusbang DATIN Balitbang Kumham

Layanan TI sebagai inventarisasi penelitian di bidang hukum dan HAM.

# Daftar Inventaris Masalah (DIM) Bidang Teknologi Informasi

SDM, KEBIJAKAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TI	INFRASTRUKTUR, LAYANAN, PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN TI	DATA, INFORMASI DAN KERJASAMA TI
1. Kurangnya SDM TI yang paham perangkat atau jaringan atau Sistem informasi.	1. Kurang optimal dalam pengelolaan perangkat TI di Kanwil.	1. Format dan struktur data aplikasi di seluruh unit kementerian yang berbeda-beda sehingga menyulitkan proses integrasi data
2. Jumlah SDM TI yang masih kurang dibanding kebutuhan sehingga menyebabkan <i>overload</i> pekerjaan.	2. Tidak tersentralnya perangkat-perangkat TI yang ada di Kanwil.	2. Belum terintegrasinya peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tumpang tindih dan duplikasi dalam data peraturan.
3. Penempatan SDM TI di beberapa unit tidak sesuai dengan kompetensinya.	3. Peran TI di kanwil masih dianggap sebagai supporting, sehingga tidak menjadi perhatian utama.	3. Belum terkelolanya seluruh data dan informasi kementerian dalam satu penyimpanan dan pengelolaan.
4. Kurangnya pelatihan teknologi informasi dan tersertifikasi.	4. Perangkat TI atau perangkat pendukung di kanwil belum memenuhi standar yang telah dibuat oleh Kemenkumham.	4. Sulitnya birokrasi antar unit dalam proses pertukaran data.
5. Tidak adanya sosialisasi kebijakan terkait TI.	5. Belum terintegrasinya jaringan semua unit utama dalam mendukung proses integrasi satu data	5. Beberapa aplikasi di unit utama masih dikuasai oleh pihak ketiga sehingga sulit untuk penyatuan datanya dan rentan untuk kerahasiaan
6. Deskripsi tugas dan fungsi Direktorat dan Sub Direktorat organisasi TI tidak jelas spesifikasinya, sehingga terdapat peran yang saling tumpang tindih.	6. Belum adanya dokumentasi secara menyeluruh terkait infrastruktur TI	6. Belum optimalnya penerapan standar pengembangan SI terkait perencanaan yang jelas mengenai tahapan-tahapan pengembangan, alur permintaan pengembangan, dan koordinasi antar unit.
7. Kurangnya koordinasi perencanaan TI sehingga menyebabkan ketidakefisienan anggaran, SDM, infrastruktur, dll.	7. Belum pernah dilakukan audit TI internal	7. Pengembangan aplikasi dan data yang ada didalamnya belum terdokumentasi dengan baik.
8. Belum adanya evaluasi perencanaan, kebijakan, dan penganggaran TI.	8. Kurangnya kesadaran pengguna sistem terhadap keamanan data dan sistem informasi.	8. Kurangnya kerjasama kemenkumham dengan instansi lain dalam proses integrasi data.
9. Komite TIK belum menjalankan tugasnya dengan optimal sebagai pengarah, pengambil keputusan, dan mengevaluasi TI.	9. Belum adanya manajemen risiko TI dan <i>vulnerability assessment</i> terkait TI.	9.
10. Pusdatin sebagai coordinator TI Kementerian, belum dilibatkan dalam proses penganggaran TI.	10. Pemenuhan kebutuhan internet yang belum optimal. Perlunya penambahan <i>bandwidth</i> .	10.

# Action Plan Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Kementerian Hukum dan HAM

- CONTOH -

No.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	ACTION PLAN
1	Mewujudkan Pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM berbasis Teknologi Informasi	1. Dilaksanakannya layanan administrasi kepegawaian berbasis TI	Terwujudnya SIMPEG yang mampu memberikan layanan administrasi kepegawaian kepada seluruh pegawai Kemenkumham	Telah di sosialisasikan pemanfaatan SIMPEG bagi seluruh pegawai Kemenkumham	B01 Diisi oleh Peserta Rakor	Diisi oleh Peserta Rakor	Diisi oleh Peserta Rakor
		2. Dikoordinasikannya pengembangan TI Kemenkumham baik dalam bidang Infrastruktur maupun aplikasi dalam sebuah grand design TI Kementerian	Pengembangan infrastruktur dan aplikasi di unit utama dan Kanwil tidak tumpang tindih atau duplikasi sehingga efektifitas dan efisiensi anggaran TI Kemenkumham bisa ditingkatkan				

No.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	ACTION PLAN
		3. Dilaksanakannya evaluasi keamanan system informasi	Seluruh system informasi yang menyangkut layanan publik di Kemenkumham memiliki tingkat keamanan yang baik sehingga kerahasiaan dan integritas data Kementerian terjaga dengan baik				
	- CONTOH -	4. Diotomasikannya seluruh pelayanan publik Kemenkumham	Seluruh pelayanan publik di Kemenkumham dapat di akses publik dengan mudah, cepat, dan transparan melalui aplikasi ....		- CONTOH -		
		5. Ditingkatkannya kualitas SDM TI Kemenkumham	Peningkatan kemampuan dan keahlian SDM TI Kemenkumham melalui Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi dalam bidang .....				
		6. Integrasi Data Kementerian dalam sebuah data warehouse/data lake untuk poengambilan keputusan yang cepat dan akuntabel	Terwujudnya dashboard pimpinan yang dapat digunakan oleh Pimpinan dalam mengambil keputusan strategis Kementerian				

## Output dan Outcome RAKOR TI Kemenkumham 2019

### Output

1. Dokumen Action Plan Pengelolaan Teknologi Informasi di Kementerian Hukum dan HAM
2. Rekomendasi

### Outcome

Arah Tujuan Pelaksanaan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi lebih jelas dan terukur

# Susunan Kepanitiaan

<b>Pembina</b>	: <b>Sekretaris Jenderal</b>
<b>Penanggung Jawab</b>	: <b>Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi</b>
<b>A. TIM Pengarah (SC)</b>	
Ketua	: Kepala Bidang Standardisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi
Sekretaris	: Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi
Anggota	: 1. Kepala Sub Bidang Standardisasi Teknologi Informasi 2. Kepala Sub Bidang Kerjasama dan Evaluasi Teknologi Informasi 3. Aman Budi Manduro, S.Kom., M.MSI
Sekretariat	: 1. Rohmayani, S.T. 2. Ari Susandra, S.Kom. 3. Puji Andreanto, S.Kom. 4. Rifky Zulfikar Fawzi, S.Kom. 5. David B.A.P. Laoli, S.Kom 6. Pramita Septiayani, S.Kom., M.TI
<b>B. Panitia Pelaksana (OC)</b>	
Ketua	: Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Sekretaris	: Plt. Kepala Bidang Data dan Pengamanan Jaringan
<b>Bidang-bidang</b>	
<b>1. Bidang Acara dan Persidangan</b>	
Koordinator	: Kepala Bidang Standardisasi dan Kerja sama Teknologi Informasi;
Anggota	: 1. Kassubag Acara dan Tamu Pimpinan Biro Umum; 2. Plh. Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi; 3. Tongam Sihombing, S.H.; 4. Muhammad Heindardi Yuansyah, S.Kom.; 5. David B.A.P. Laoli, S.Kom.

## 2. Bidang Administrasi dan Akomodasi

Koordinator	: Kepala Sub Bidang Pengamanan Data dan Jaringan
Anggota	: 1. Kepala Subbidang Kerja Sama dan Evaluasi Teknologi Informasi; 2. Rehan Parga Ali, SE.,MM 3. Tomy Kurniawan, S.Kom. 4. I Gusti Bagus P, S.Kom; 5. Triastian Satria Wibowo, S.Kom.; 6. Agus Supriyanto, SH., MH.; 7. Elista Lia Vitaloka;

## 3. Bidang Registrasi dan Keuangan

Koordinator	: Kepala Subbagian Keuangan
Anggota	: 1. Kepala Subbidang Pemeliharaan Teknologi Informasi; 2. Don Ardhito, S.Kom.; 3. Satrio Wibisono, S.Kom.; 4. Amir Mujahiduddin, S.Kom.; 5. Bangun Winandita, S.Kom.; 6. Ainatul Maulida, S.Kom.; 7. Mohamad Kamaludin; 8. M. Fadlu Robby, S.Kom; 9. Emir Mochamad Wijaya, A.Md.

## 4. Bidang Perlengkapan

Koordinator	: Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
Anggota	: 1. Rafel Septian Maulana; 2. Erick Pebri David Prayoga; 3. Pandu Prasetyo; 4. Bayu Ismanto; 5. Rizki Cahyadi; 6. Ahmad Furqoni; 7. Bimantara; 8. Angesti Yustika Cahyaningtyas 9. Shyntia Dewi Kilisuci; 10. Dani Sharmanta;

## 5. Bidang Kesehatan

Koordinator	: Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Anggota	: 1. Catur Ismi Adnani; 2. Prapti Supantini, S.H.

# Narasumber dan Peserta Rakor TI

## Narasumber

1. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Biro Perencanaan
3. Kepala Biro Kepegawaian
4. Kepala Biro Keuangan
5. Kepala Biro Umum
6. Kepala Biro Pengelolaan BMN
7. Kepala Biro Humas dan KLN
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
9. Direktur Sistik Ditjen Imigrasi
10. Direktur TI Ditjen AHU
11. Direktur TI Ditjen KI
12. Direktur TI dan Kerjasama Ditjen PAS
13. Inspektur Wilayah IV
14. Direktur Pengundan & Publikasi Ditjen PP
15. Kapusdok BPHN
16. Kapuspenkom BPSDM Hukum dan HAM
17. Direktur Informasi HAM Ditjen HAM
18. Kapusbang DATIN Balitbang Kumham

## Peserta

1. Kasubdit Pengembangan TI Ditjen PAS
2. Kasubdit Pengamanan dan Pemeliharaan TI Ditjen PAS
3. Kasubdit Data dan Informasi Ditjen PAS
4. Kasubdit Kerjasama dan Evaluasi Ditjen PAS
5. Kasubdit Perencanaan dan Dukungan Teknis Ditjen AHU
6. Kasubdit Pengembangan Jaringan dan Perangkat Keras Ditjen AHU
7. Kasubdit Pengembangan Perangkat Lunak Ditjen AHU
8. Kasubdit Perencanaan Ditjen KI
9. Kasubdit Pengembangan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Ditjen KI
10. Kasubdit Pendukung Infrastruktur Ditjen KI
11. Kasubdit Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP
12. Kasubdit Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP
13. Kasubdit Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan Ditjen PP
14. Kasubdit Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP
15. Kabid Otomasi Dokumentasi Hukum BPHN
16. Kabid Jaringan Informasi Hukum BPHN
17. Kabid Pelayanan Informasi Hukum BPHN
18. Kabag Program Dan Pelaporan Sekretariat BPHN
19. Kabid Program BPSDM
20. Kabid Penyelenggaraan BPSDM
21. Kabid Sistem Informasi BPSDM
22. Kasubdit Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen HAM
23. Kasubdit Publikasi Media Ditjen HAM
24. Kasubdit Perpustakaan dan Dokumentasi Ditjen HAM
25. Kabid Meta Analisis Data Penelitian Hukum dan HAM Balitbangkumham
26. Kabid Pengembangan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM Balitbangkumham
27. Kabid Fasilitas Publikasi Penelitian Hukum dan HAM Balitbangkumham
28. Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan Ditjen IM
29. Kasubdit Pemeliharaan dan Pengawasan Ditjen IM
30. Kasubdit Kerjasama dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Keimigrasian Ditjen IM
31. Kasubdit Pengelolaan Data dan Pelaporan Ditjen IM
32. Kepala Bagian Sistem Informasi Pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal
33. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan;
34. Kepala Bagian Pemantauan Analisis dan Pelaporan, Biro Perencanaan
35. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Kepegawaian, Biro Kepegawaian;
36. Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan;
37. Kepala Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara;
38. Kepala Bagian Status Penggunaan dan Pengamanan Barang Milik Negara, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara;
39. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama;
40. Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama;
41. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian, Biro Umum;
42. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Bengkulu;
43. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Lampung;
44. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Yogyakarta;
45. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kalimantan Tengah;
46. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Sulawesi Barat;
47. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Maluku Utara;
48. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kalimantan Barat;



## Tim Perumus Action Plan

1. Kepala Subdirektorat Perencanaan Dan Pengembangan Direktorat Sistem Dan Teknologi Ditjen Imigrasi
2. Kepala Subdirektorat Pengembangan Jaringan Dan Perangkat Keras Direktorat Teknologi Informasi Ditjen AHU
3. Kepala Subdirektorat Perencanaan Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Ditjen KI
4. Kepala Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi Direktorat Teknologi Informasi Dan Kerja sama Ditjen PAS
5. Kepala Bagian Program Dan Pelaporan Sekretariat BPHN
6. Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP
7. Kepala Subdirektorat Pengembangan Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Direktorat Informasi Hak Asasi Manusia Ditjen HAM
8. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Dan Sistem Informasi Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pusat Pengembangan Data Dan Informasi Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Balitbangham
9. Kepala Bidang Sistem Informasi Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM
10. Kepala Bagian Sistem Informasi Pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal
11. Kepala Bagian Program Dan Anggaran Biro Perencanaan
12. Kepala Bagian Perencanaan Dan Sistem Informasi Kepegawaian Biro Kepegawaian
13. Kepala Bagian Program Dan Pelaporan Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Barat

# Komisi

## KOMISI I

SDM, KEBIJAKAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TI

KETUA : Kepala Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan  
SEKRETARIS : Kasubdit Perencanaan Ditjen KI  
NOTULA & ASROT : Pramita Septiyani, S.Kom.

ANGGOTA :

1. Kasubdit Kerjasama dan Evaluasi Ditjen PAS
2. Kasubdit Perencanaan dan Dukungan Teknis Ditjen AHU
3. Kasubdit Perencanaan Ditjen KI
4. Kasubdit Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan Ditjen PP
5. Kabid Otomasi Dokumentasi Hukum BPHN
6. Kabid Penyelenggaraan Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM
7. Kasubdit Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen HAM
8. Kabid Fasilitasi Publikasi Penelitian Hukum dan HAM Balitbangkumham
9. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Kepegawaian, Biro Kepegawaian;
10. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan;
11. Kepala Bagian Pemantauan Analisis dan Pelaporan, Biro Perencanaan
12. Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan;
13. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Bengkulu;
14. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Yogyakarta;
15. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Sulawesi Barat;
16. Kepala Bagian Program Dan Pelaporan Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

# Komisi

## KOMISI II

INFRASTRUKTUR, LAYANAN,  
PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN TI

KETUA : Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan Ditjen Imigrasi  
SEKRETARIS : Kasubdit Pengamanan dan Pemeliharaan TI Ditjen PAS  
NOTULA & ASROT : Ainatul Maulida, S.Kom

ANGGOTA :

1. Kasubdit Pengamanan dan Pemeliharaan TI Ditjen PAS
2. Kasubdit Pengembangan Jaringan dan Perangkat Keras Ditjen AHU
3. Kasubdit Pendukung Infrastruktur Ditjen KI
4. Kasubdit Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP
5. Kabid Pelayanan Informasi Hukum BPHN
6. Kabid Program BPSDM
7. Kasubdit Publikasi Media Ditjen HAM
8. Kabid Pengembangan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM Balitbangkumham
9. Kasubdit Pemeliharaan dan Pengawasan Ditjen IM
10. Kasubdit Kerjasama dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Keimigrasian Ditjen IM
11. Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan Ditjen IM
12. Kepala Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara;
13. Kepala Bagian Status Penggunaan dan Pengamanan Barang Milik Negara, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara;
14. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Lampung;
15. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kalimantan Tengah;
16. Kepala Bagian Sistem Informasi Pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal

## Komisi

### **KOMISI III**

#### DATA, INFORMASI DAN KERJASAMA TI

KETUA : Kasubdit Pengembangan TI Ditjen PAS  
SEKRETARIS : Kabid Jaringan Informasi Hukum BPHN  
NOTULA & ASROT : M. Fadlu Robby, S.Kom

ANGGOTA :

1. Kasubdit Data dan Informasi Ditjen PAS
2. Kasubdit Pengembangan TI Ditjen PAS
3. Kasubdit Pengembangan Perangkat Lunak Ditjen AHU
4. Kasubdit Pengembangan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Ditjen KI
5. Kasubdit Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP
6. Kasubdit Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP
7. Kabid Jaringan Informasi Hukum BPHN
8. Kabid Sistem Informasi BPSDM
9. Kasubdit Perpustakaan dan Dokumentasi Ditjen HAM
10. Kasubdit Data dan Informasi Ditjen PAS
11. Kabid Meta Analisis Data Penelitian Hukum dan HAM Balitbangkumham
12. Kasubdit Pengelolaan Data dan Pelaporan Ditjen IM
13. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama;
14. Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama;
15. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian, Biro Umum;
16. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Maluku Utara;
17. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kalimantan Barat;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



# Terima kasih



REFORMASI  
HUKUM

